

BIBLIOGRAPHY

Books

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ary Suta, I Putu Gede, and Soebowo Musa. 2008. *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Yayasan Sad Satria Bhakti. Jakarta.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. 2001 Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, and M. M. Se. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Jakarta
- Fuady, Munir. 2000. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras. 2024. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Garner, Bryan A., ed. 2019. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. Thomson Reuters. St. Paul, MN.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa, 1999.
- Hoff, and Churchill. 1999. *Indonesian Bankruptcy Law*. Tatanusa. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Alumni. Bandung.

- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo. 2023. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik*. Kontan Publishing. Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa Publisher, 2012.
- Soeroso, Raharjo. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2008. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Grafiti. Jakarta
- Victorianus, Randa Puang. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011.
- Wessels, Bob, Bruce A. Markell, and Jason J. Kilborn. 2009. *International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters*. Oxford University Press. Oxford.

Papers

- Abonyi, George. *Policy Reform in Indonesia and the Asian Development Bank's Financial Sector Governance Reforms Program Loan*. ERD Working Paper Series No. 76. Manila: Asian Development Bank, 2005.
- Elijana and Emmy Yuhassarie. 2005. *Essensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, in *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Jenifer, Alfit. “Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 144–62.
- Ibrahim, Helmi, Hendri Hendri, and Serlika Aprita. “Penerapan Asas Keadilan bagi Konsumen yang Tidak Dapat Memohon Pailit dan PKPU kepada Developer Apartemen atau Rumah Susun terhadap Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2024): 138–57.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jakarta, 2018.

Wessels, Bob, Bruce A. Markell, and Jason J. Kilborn. *International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Essays in a Book

Ellijana, and Emmy Yuhassarie. 2005. “Essensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan” in Rudhy A. Lontoh, ed. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.

Mulyadi, Kartini. 2001. “Bankruptcy and Settlement of Debts Receivables” in Rudhy A. Lontoh, ed. *Settlement of Debts Receivables Through Bankruptcy or Postponement of Debt Payment Obligations*. Alumni. Bandung.

Setiawan. “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya Kini” in Rudhy A. Lontoh, ed. *Settlement of Debts Receivables Through Bankruptcy or Postponement of Debt Payment Obligations*. Alumni. Bandung.

Laws and Regulations

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan*.

Theses & Dissertations

Syahputra, Imam Mahdi. 2024. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Utang Kreditor Dapat Dibuktikan Sederhana Dalam Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."* Postgraduate Thesis, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Salsabila, Natashya Friska. 2022. *"Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta atau Keadaan Sederhana Dalam Permohonan Pernyataan Pailit."* Bachelor's Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Sagita, Febby Aulia Dwi. *Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.)*. Bachelor's Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.

Cases & Judicial Decisions

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)*.

Online Sources

International Monetary Fund. 1997. "Indonesia: Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding." Accessed December 5, 2024. <https://www.imf.org/external/np/loi/2001/idn/02/index.htm>.